



## **PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH**

Rahmat Arfan <sup>a\*</sup>, Ricky Ariansyah<sup>b</sup>, Indra Akbar<sup>b</sup>, Desy Puspita<sup>a</sup>, Fitriani Rizky<sup>a</sup>, Muntasir<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kuta Raja Banda Aceh

<sup>b</sup> Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja Banda Aceh

<sup>c</sup> Analisis Keuangan, Politeknik Kutaraja Banda Aceh

\* Corresponding Author: [rahmatarfan@poltekkutaraj.ac.id](mailto:rahmatarfan@poltekkutaraj.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai pelatihan bagi kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi di Aceh Tamiang, kegiatan ini melibatkan beberapa aspek, seperti aspek teknis, finansial, lingkungan, dan sosial. Kegiatan juga memberikan pelatihan pengawasan kegiatan untuk mencapai target pemerintah tahun 2024 dengan target air minum dan sanitasi mencapai pemerataan hingga 100% dengan ketahanan air menggunakan metode 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan Keterjangkauan).

Keywords: Air Minum, Sanitasi, Aceh Tamiang

### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik Aceh pada tahun 2019 Aceh berada pada angka 70,16% terhadap sumber air minum layak, untuk Aceh tamiang sendiri angka tersebut tidak terlalu jauh sejak tahun 2017-2019 peningkatan terjadi cukup sedikit dari 67,35% - 72,69% hanya sebesar 5,34% saja kenaikan yang terjadi terkait sumber air yang layak minum (*Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2019*), secara khusus aceh perlu pembangunan sarana air yang layak. Pembangunan kelayakan air minum tidak serta merta dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang diwakili oleh PUPR, namun juga dari pemerintah daerah seperti Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung serta masyarakat sebagai penerima layanan dari pembangunan sarana air dan sanitasi.

Sarana air dan sanitasi yang bersih akan sangat memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan di masyarakat jika telah selesai di bangun, berfungsi dengan baik dan dapat dioperasikan dengan baik. Namun untuk dapat dimanfaatkan secara optimal serta berkelanjutan maka perlu di kelola dan dikembangkan secara baik (Pamsimas, 2021)

Dalam pengelolaan yang berkelanjutan tentunya memerlukan biaya yang stabil yang akan dikeluarkan dalam memelihara, mengoperasikan dan pengembangan sehingga efektifitas sarana. Pengelolaan dan biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan ini perlu di kelola oleh Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat yang memiliki kapabilitas yang

memadai dalam mengelola air minum dan sanitasi dengan ditunjang dengan komitmen yang tinggi dan transparan (Samad, 2022).

Dalam konsep program Pamsimas yang berpijak kepada pemberdayaan masyarakat, maka sarana SPAMS terbangun tersebut dikelola oleh lembaga yang disebut dengan Kelompok Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). KPSPAMS dibentuk oleh KKM melalui musyawarah dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah. Kelembagaan KPSPAMS dibentuk sejak tahap perencanaan agar dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga KPSPAMS dapat memahami program lebih baik dan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap desain program dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan yang akan diperlukan pada tahap pasca program. KPSPAMS merupakan unit otonom atau mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola kegiatan dan organisasi secara internal namun tetap dibawah koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan (Ronaldy, 2022).

Terkait Kelompok Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi(KPSPAMS) yang dilaksanakan Pada kabupaten Aceh Tamiang terdapat sebanyak 46 (enam) desa, dengan gambaran kondisi kinerja pengelolaan SPAMS sebagai berikut :

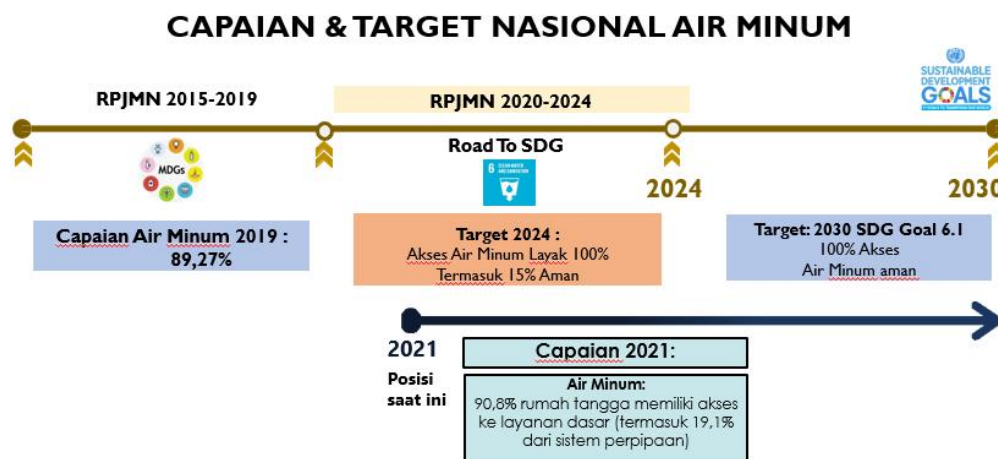
- Keberfungsian SPAMS : 30 desa berfungsi baik, 16 desa berfungsi sebagian
- Menerapkan pengumpulan iuran : 10 desa iuran > BOP, 16 desa iuran = BOP.
- Pengelolaan Pembukuan : 6 desa Pembukuan tidak lengkap

Melihat kondisi KPSPAMS yang terjadi di Aceh Tamiang serta Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Pengurus KPSPAMS memerlukan penguatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, agar sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi dimaksud. Dengan program yang terencana seperti: Memberikan masukan terhadap pilihan opsi kegiatan yang direncanakan, Memberikan masukan ke dalam rencana operasi dan pemeliharaan fasilitas yang didirikan, seperti rencana volume pasokan air dan proses pengelolaan keuangan; mengawasi pelaksanaan kegiatan konstruksi RKM dan kegiatan lainnya; mengelola layanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat; menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan masyarakat , Terutama dalam volume kecil dan volume besar; menyelenggarakan kegiatan konservasi air, termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian air; melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja; mengidentifikasi cara untuk meningkatkan pendanaan atau mengembangkan fasilitas; kebiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah, berjejaring dengan pihak lain (kemitraan ).

## Rancangan Target Nasional Air Minum

Secara umum capaian dan target nasional Air Minum terus berkembang dari tahun 2019 sampai dengan 2021, di tahun 2019 capaian air minum sebanyak 89,27% dan di tahun 2021 capaian air minum sebanyak 90,88%, dimana rumah tangga memiliki akses ke layanan dasar (termasuk 19,1% dari sistem pipa). Target program capaian air minum di tahun 2024 akses air minum layak 100% termasuk 15% aman, kemudian di tahun 2030

target menjadi 100% akses air minum aman (Bappeda, 2021). Guna mencapai target yang telah disesuaikan pemerintah kemudian membentuk Kelompok Pengelola Sarana Air Minum Dan Sanitasi (KPSPAMS) yang kepemilikannya dikelola oleh masyarakat secara keseluruhannya (Pamsimas, n.d.) program ini telah banyak membangun prasarana dan sarana air minum dan sanitasi di desa dan kelurahan yang secara keseluruhannya di Kelola oleh masyarakat. Dalam pengelolaan ini kemudian dibentuk organisasi khusus dengan nama Badan pengelolaan Sarana Penyediaan Air minum dan Sanitasi (BPSPAMS), selanjutnya organisasi ini kemudian kerap membuat workshop, pelatihan dan forum Bersama sebagai wadah bertukar informasi serta penguatan yang dapat menjadi informasi dan pembelajaran bagi anggota pengurus.



Dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Sarana Air Minum Dan Sanitasi (KPSPAMS) bertujuan secara umum untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan KPSPAMS dalam mengelola sarana air minum dan sanitasi yang sudah terbangun agar berkelanjutan.

Secara khusus tujuan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Sarana Air Minum Dan Sanitasi (KPSPAMS) adalah 1) Meningkatkan kemampuan teknis pengurus KPSPAMS dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana. 2) Meningkatkan kemampuan pengurus KPSPAMS dalam pengelolaan iuran (penerapan dan pengumpulan). 3) Meningkatkan kemampuan pengurus KPSPAMS dalam menyusun rencana kerja. 4) Meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengorganisir dan mengelola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana SPAM dan kegiatan sanitasi di desa/kelurahannya dengan benar.

Dalam rangka penguatan kapasitas itu, beberapa upaya perlu terus dilakukan terkait Program Pamsimas, melalui kegiatan pelatihan dan atau pendampingan (*coaching dan mentoring*) oleh Fasilitator Masyarakat (FM) sejak KPSPAMS dibentuk, khususnya dalam kaitan dengan keterlibatan KPSPAMS sebagai pengawas/pemantau dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana air minum dan sanitasi.

## 2. Pendekatan dan Metodologi

Pelatihan mengadopsi metode pendidikan orang dewasa, berdasarkan prinsip meringkas pengalaman. Prinsip ini menjadi dasar bagi keseluruhan proses pelatihan, dimana peserta menjadi pemain kunci dalam pencapaian tujuan pelatihan (Setiawati et al., n.d.). Pelaksanaannya akan menggunakan berbagai metode yaitu: ceramah, brainstorming, diskusi kelompok, diskusi pleno dan simulasi/praktik.

Adapun jumlah peserta yang hadir dalam program ini adalah sebanyak 46 orang dari 46 Desa. Dengan beberapa materi yang di sampaikan tentang 1) Alur Pelaksanaan Pelatihan, 2) Gambaran Umum Kegiatan, 3) Pembahasan dalam Masyarakat dan Kualitas Air. 4) Gender, Disabilitas dan Stunting keterkaitan dengan penggunaan kebersihan air dan sanitasi, 5) Pengaturan tentang Desa, 6) Arah Kebijakan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, 7) Perencanaan SPAMS, 8) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, 9) Membangun KPSPAMS yang Mandiri, 10) Sumber-sumber Pendanaan untuk Pengembangan Air Minum, 11) Peningkatan Kapasitas untuk Operasional dan Pemeliharaan, 12) Kemitraan.

Pada kegiatan kemudian diberikan materi pelatihan tentang tata cara menjaga dan melanjutkan pengelolaan SPAMS. Sebagai sebuah organisasi berbasis masyarakat perlu menjaga beberapa aspek seperti Aspek Teknis, Aspek Keuangan, Aspek kelembagaan, Aspek lingkungan dan Aspek sosial.

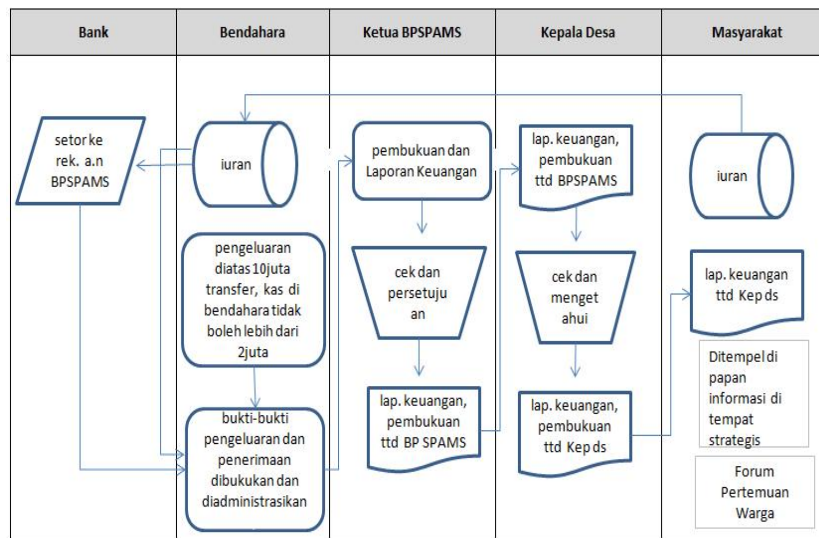


Pada Aspek Teknis, teknologi menjadi peran penting dalam berfungsinya secara benar dan dapat diandalkan dari pelayanan sistem air minum sehingga jumlah air yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kualitas air akan terpenuhi sesuai standar kesehatan. Aspek ini juga membantu prioritas masyarakat di bawah garis kemiskinan dengan pola: Membuat rencana sesuai dengan standar teknis, memilih pelaksana yang mampu dan terampil untuk

menerapkan, dan menerapkan, mengoperasikan, dan memelihara sesuai dengan kuantitas dan kualitas rencana

Aspek Keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses keberlanjutan program, Suatu sistem hanya berfungsi jika pendanaan atau sumber keuangan setidaknya memadai untuk operasioan, pemeliharaan dan perbaikan. Kewajaran dan kesetaraan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi sumber dana dan seberapa adil sumber dana akan dibagi di antara penerima manfaat dari tingkat manfaat yang berbeda. Pelaporan keuangan adalah penyediaan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan organisasi untuk membantu pengambilan keputusan (Andari, 2022). Pelaporan adalah proses penyampaian data dan/atau informasi tentang status dana yang diterima dan disalurkan (Kadarningsih et al., 2017). Administrator harus bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan keuangan anggota/masyarakat dan pemerintah (desa/kabupaten/kabupaten/kota).

Skema alur pelaporan keuangan:

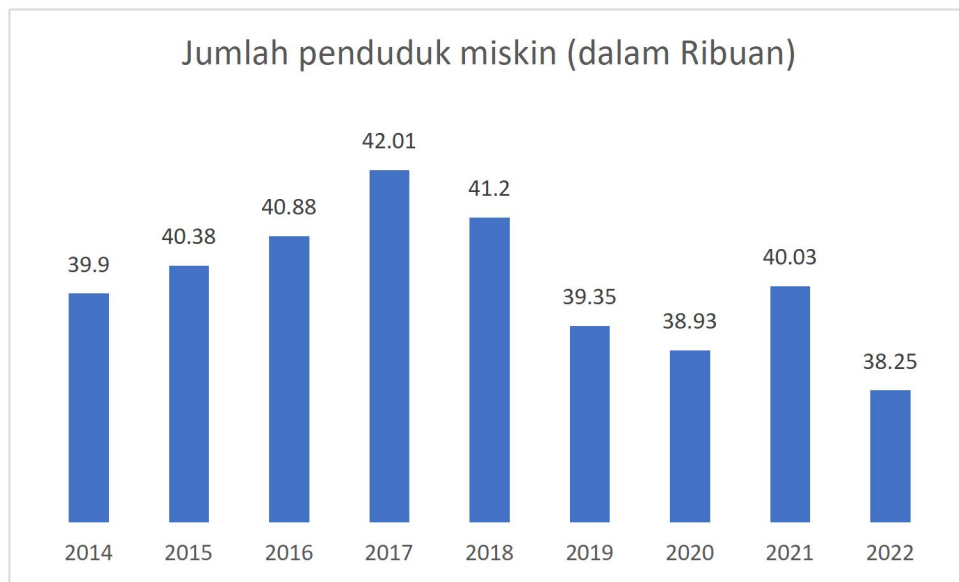


Aspek kelembagaan adalah fungsi dan partisipasi kelompok dalam mengelola program, seperti perhatian terhadap kesetaraan gender dan partisipasi masyarakat miskin, serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan transparansi. Keadilan/Kesetaraan mempertimbangkan suara semua kelompok, terutama kaum miskin dan perempuan dalam organisasi yang mengelola dan mengendalikan sistem. Institusi yang ada harus memiliki identitas lokal, aturan dan tanggung jawab. Selain itu, dalam hal membangun kapasitas melalui pelatihan, masyarakat miskin dan gender juga harus dilibatkan, baik dalam mengidentifikasi jenis pelatihan maupun peserta pelatihan..

Secara lingkungan, yang mendukung penuh rencana tersebut adalah ketergantungan tidak langsung, karena sumber air akan menghadapi banyak ancaman, seperti pengambilan air yang berlebihan, polusi, penggundulan hutan, sedangkan air minum dan sanitasi/fasilitasnya sendiri

akan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan, seperti karena kurangnya sumber daya. Drainase yang memadai untuk meminimalkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya serangga pembawa penyakit seperti malaria. Hal-hal di atas harus diperhatikan untuk dilaksanakan atau dihindari. Aspek kewajaran/ekuitas meliputi pemerataan tanggung jawab perlindungan sumber air dan lingkungan di antara penerima manfaat. Salah satu dari lima aspek tersebut di atas dan yang lainnya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Artinya menjamin keberlanjutan air minum dan sanitasi, tidak hanya satu aspek, tetapi harus holistik atau menyeluruh.

Kemudian yang terakhir aspek sosial dimana mendukung program ini dengan dukungan keberlanjutan sistem bila keinginan masyarakat terpenuhi, dengan kemudahan akses, yang mana pemanfaat diberikan pilihan untuk teknologi pelayanan sesuai dengan kemampuan pembiayaan, budaya dan tata cara keseharian. Aspek persamaan dan kesetaraan melihat bagaimana keuntungan dari pemanfaatan sistem dapat dibagi secara adil sesuai dengan perbedaan kondisi sosio-ekonomi, gender dan kemiskinan.



Data garis kemiskinan Aceh Tamiang menunjukkan penurunan selama dari 2014 menuju ke 2022, dari hasil menunjukkan dari angka 39,9 ribu menurut menjadi 38,25 ribu penurunan sebanyak 1,65 ribu (BPS Kab. Aceh Tamiang, 2023). Namun jika di banding pada seluruh kabupaten di Aceh dalam periode tahun 2014 s.d 2022, Aceh Tamiang masuk ke dalam peringkat ke 17 dari 23 kabupaten di Aceh, hasil ini belum menunjukkan angka yang terbaik , sehingga dalam program ini pengutamakan masyarakat miskin sangat dibutuhkan guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan manfaat air bersih dan sanitasi yang layak.(Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022)

### 3. Pelaksanaan/ Implimentasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah di meeting room dengan menggunakan infocus dan papan tulis sebagai alat pembelajaran, kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan peserta dari seluruh desa yang ada di Aceh tamiang dengna tujuan agar Peserta memahami dan melaksanakan keberlanjutan pengelolaan SPAMS dengan mengedepankan 5 Aspek Keberlanjutan untuk ketersediaan air minum dan sanitasi dengan mencakup keuangan, teknis kelembagaan, sosial dan lingkungan serta pengamanan sosial dengan menganalisa potensi penyebab ketidakbelangsunan dan berkelanjuran SPAM di desanya. Kemudian peserta juga akan dapat Melaksanakan AD/ART termasuk hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Selanjutnya pada kegiatan ini peserta kegiatan dapat Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten/Kota maupun dana lain yang tidak mengikat. kemudian dapat menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna/pemanfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus KPSPAMS. Selanjutnya memberikan laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kepada KKM dan Pemerintah Desa/Kelurahan secara berkala (1 kali 6 bulan), dan mempublikasikannya.

Peserta kemudian juga dapat mengelola pemakaian air dan pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat. Peserta mampu Mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana Peserta dapat Menginventarisasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan.

Kemudian yang tidak kalah penting dari kegiatan ini adalah Peserta mampu Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi, antara lain:

- a) Menginventarisasi sarana dan prasarana sarana air minum dan sanitasi desa/kelurahan
- b) Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi
- c) Mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi Desa/Kelurahan.
- d) Mengorganisasikan kegiatan: pelestarian sumber air minum, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di masyarakat dan sekolah), kegiatan kesehatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah), termasuk meningkatkan penggunaan jamban.



#### 4. Hasil Kegiatan

*Water Safety Plan (WSP)* atau dapat diterjemahkan sebagai Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di definisikan sebagai upaya pengamanan air minum mulai dari sumber (*cathment*)

sampai air siap minum di rumah tangga yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan (Shanty et al., 2020)

Secara umum hasil yang diharapkan dari Program kegiatan ini adalah Tersedianya Pengurus yang mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan dan harapan program, khususnya dalam mengoperasikan dan memelihara sarana sistem penyediaan air minum dan sanitasi terbangun.

Secara khusus hasil yang diharapkan dari Pelatihan ini adalah : mampu menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi, mampu mengorganisasikan kegiatan : pelestarian sumber air minum, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di masyarakat dan sekolah), kegiatan kesehatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah ), termasuk meningkatkan penggunaan jamban, mampu membuat Pembukuan secara lengkap, Mampu memberikan laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kepada KKM dan Pemerintah Desa/Kelurahan secara berkala, dan memublikasikannya, Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain (kemitraan).

Sehingga dalam pengamanan sumber air perlu ada keamanan penyediaan air minum kepada pemanfaatnya/konsumen yang mencakup Menciptakan pengelolaan sistem air minum yang menjamin aspek 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) air minum secara berkesinambungan; Untuk menciptakan kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BPSPAMS secara efektif, efisien dan aman.

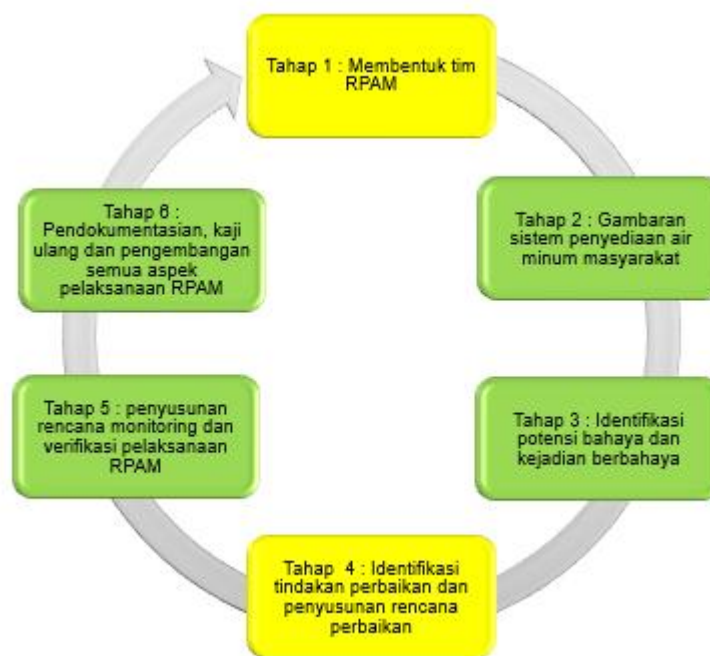
Prinsip dasar sarana air minum komunal adalah sebagai berikut : Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan air minum dan wajib membayar iuran sesuai penggunaannya, Mengutamakan pelayanan penyediaan air minum atas prakarsa masyarakat kepada penggunaannya, Penyelenggaraan kegiatan dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak terkait, Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan, Semua proses pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah, sehingga mendapat dukungan dan diterima oleh masyarakat pengguna layanan, Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai acuan penilaian besarnya risiko, hasil produksi dan kinerja dengan konsep yang 4K didefinisikan sebagai berikut : K1 (Kualitas) adalah acuan kualitas air minum yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. K1 ini menggunakan standar air minum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. K2 (kuantitas) adalah acuan jumlah air yang dinilai mencukupi bagi pola hidup/penggunaan air masyarakat. K2 ini menggunakan standar kebutuhan pokok air minum yaitu 10 M<sup>3</sup>/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2014.(Kementrian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat, 2014) K3 (Kontinuitas) adalah acuan tidak terputusnya aliran air dari instalasi pengolahan air minum kepelanggan. K3 ini menggunakan standar lama pengaliran tak terputus selama 24 jam/hari.



K4 (Keterjangkauan) adalah acuan harga air minum yang layak bagi masyarakat sesuai dengan Permendagri no 23 tahun 2006 yaitu tidak melampaui 4 % dari pendapatan masyarakat pelanggan (Kementrian Dalam negeri, 2006)

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pada pelatihan ini pada sarana air minum komunal ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut : Masyarakat dapat menikmati air minum yang aman dengan memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Terbentuknya kelompok masyarakat yang mampu menyelenggarakan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara mandiri dan berkelanjutan



Pada prinsipnya pendekatan pelatihan rancangan ini dapat diterapkan untuk semua sistem penyediaan air minum, termasuk sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat. Secara sederhana panduan tahapan rancangan Pengamanan air minum komunal adalah seperti pada gambar siklus.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang perlu berlangsung dengan terus dijaga dalam pelaksanaannya sehingga program perlu berfungsi baik dan digunakan. Program harus Sesuai kebutuhan (desain yang direncanakan), dari sisi kuantitas kualitas air, kemudahan

akses, kontinuitas pelayanan, dan manfaat bagi derajat kesehatan dan ekonomi. System Berfungsi dalam kurun waktu yang sesuai dengan periode yang direncanakan. Pengelolaan kegiatan melibatkan masyarakat , sensitif isu gender, mendorong peran aktif berbagai pihak; Biaya Pengoperasian, pemeliharaan, pemulihan dan administrasi dipenuhi dari pembayaran pengguna atau pembiayaan lain yang berkelanjutan Dapat dioperasikan dan dikelola pada tingkat lokal dengan dukungan terbatas dari pihak luar, ex: bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi.

Saran agar kegiatan lebih sering dilaksanakan mengingat waktu pencapaian target 100% semakin dekat namun pencapaian belum mendekati maksimal.

## 6. Ucapan Terimakasih.

Ucapan terima kasih kepada LPPM politeknik Kutaraja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten Aceh Tamiang serta peserta dari seluruh Desa di Aceh tamiang telah memberikan fasilitas dan aktif hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## Daftar Pustaka

- Andari, D. (2022). , *Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan ....* <http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2107/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2019). <https://aceh.bps.go.id/indicator/29/373/1/akses-terhadap-sumber-air-minum-layak.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabkota-di-aceh.html>
- Bappeda. (2021). *(BAPPEDA) ACEH 2021*.
- BPS Kab. Aceh Tamiang. (2023). <https://acehtamiangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/3ca59872d11365284aeb8bcf/kabupaten-aceh-tamiang-dalam-angka-2023.html>
- Kadarningsih, A., Hermawan, H., Aditia, A., Tantri, M., & Nadila, F. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Ejournal.Almaata.Ac.Id*. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/447>
- Kementerian Dalam negeri. (2006). *PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126458/permendagri-no-23-tahun-2006>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat. (2014). *Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128202/permen-pupr-no-01-prtm2014-tahun->

2014

- Pamsimas. (n.d.). *Asosiasi KPSPAMS – Pamsimas*. Retrieved June 27, 2023, from <https://pamsimas.pu.go.id/profil/asosiasi-kpspams/>
- Pamsimas. (2021). *Warga Kaloy Aceh Tamiang Merasakan Bahagia Hadirnya Air Bersih – Pamsimas*. <https://pamsimas.pu.go.id/warga-kaloy-aceh-tamiang-merasakan-bahagia-hadirnya-air-bersih/>
- Ronaldy, R. (2022). *Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Samad, R. (2022). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KPSPAM MARIO PULANA DESA DUAMPANUAE KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI*. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI.
- Setiawati, R., Journal, I. S.-L. E., & 2023, undefined. (n.d.). Implementasi Prinsip Pendidikan Orang Dewasa pada Pelatihan Tata Busana di Satuan Pendidikan Non Formal SKB Ungaran. *Journal.Imadiklus.or.Id*. Retrieved July 5, 2023, from <http://www.journal.imadiklus.or.id/index.php/lej/article/view/180>
- Shanty, D., Lingkungan, R. D.-J. R., & 2020, U. (2020). Ketercapaian Sasaran 4K dalam Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di PDAM Tirta Dharma Kota Malang. *Ejurnal.Itenas.Ac.Id*, 8(2), 112–120. <http://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/lingkungan/article/view/3911>